

Data Perdagangan Orang Agustus 2014

Quis custodiet ipsos custodes? Ya, 'siapa yang mau mengawasi pengawas' ini pertanyaan penyair Roma, Juvenal. Untuk konteks sekarang siapa yang mengawasi polisi ketika polisi berbuat kriminal? Ketika muncul *whistleblower* atau orang dalam yang melaporkan penyimpangan dalam tubuh kepolisian, pertanyaan ini menjadi relevan. Rudy Soik dan Susno Duaji merupakan contoh *whistleblower* dalam tubuh Polri pasca bergesernya Seharto. Pola penanganannya serupa, mereka dibidik institusi dan dikriminalkan, tanpa ada upaya untuk membuka lebih jauh *managerial secrecy* dalam institusi.

Dalam kasus Rudy Soik, Polri tidak peka untuk membuka apa yang dilaporkan dan memilih untuk menjaga citra institusi, dengan tidak melakukan investigasi mendalam. Polisi terperangkap antara menjaga citra institusi, untuk hanya berbicara ke dalam, tetapi tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkan. Kultur internal untuk melakukan *managerial secrecy* membahayakan publik, karena institusi kepolisian menjadi 'institusi yang tidak tersentuh'.

DPO (Data Perdagangan Orang) IRGSC merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan. DPO adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan berita di tiga media harian utama di NTT yakni *Pos Kupang* (PK), *Timor Express* (TE) dan *Victory News* (VN) sebagai referensi utama, yang memuat persoalan seputar migrasi tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang (*human trafficking*) baik di lingkup domestik maupun internasional. Selain tiga media di atas, DPO IRGSC juga menggunakan berita *on line* lain sebagai alat verifikasi. Satu dekade pasca kasus Nirmala Bonat terbukti penanganan buruh migran tidak semakin baik, sebaliknya semakin diterlantarkan di kampung halaman sendiri, oleh berbagai institusi pemerintah, maupun para pelaku dari sektor privat (PPTKIS maupun para PL (Perekrut Lapangan))

Penerbitan **DPO IRGSC** adalah bagian dari pengembangan **NTT Studies** oleh **IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)**. **Peneliti:** Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy Banunaek, Ragil Supriyanto Samid, Gregorius Aviero, Rosna Bernadetha, Yadi Diaz, John Petrus Talan, **Koordinator:** D.Elcid Li. Riset ini merupakan bagian dari 'riset aksi' yang dilakukan IRGSC dalam **Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang)** yang melibatkan berbagai elemen seperti: **JPIT** (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), **PIAR** (Pusat Informasi Advokasi Rakyat), **Rumah Perempuan**, **JRUK** (Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan) maupun secara individual.

Daftar Isi

Daftar Singkatan.....	6
Ringkasan Umum Agustus 2014.....	7
Daftar Lembaga Publik yang Perlu Diawasi:	11
PTKIS Bermasalah Bulan September 2014.....	11
Kejahatan PT.Surya Jaya Utama.....	13
Posisi Berbagai Institusi terhadap Rudy Soik (<i>Whistleblower Kasus Human Trafficking</i>).....	14
Ringkasan Berita.....	18
Minggu, 31 Agustus.....	18
2014	18
LPSK: Polri Harus Jamin Rudy Soik (PK, hal. 1 & 7).....	18
Bareskrim Salahkan Disposisi Kombes MS (PK, hal.1 & 7)	18
Kapolda Merasa Dilangkahi, (PK, hal.1 & 7).....	18
Sabtu, 30 Agustus 2014.....	19
Aktivis LSM Tetap Pantau Kasus Rudy (VN, hal.1)	19
Menanti Polda Bersih Diri, VN (hal.1 (editorial))	19
Nasib Brigpol Rudy di Tangan Kapolres TTS (PK, hal.1).....	19
Mabes Polri Klarifikasi (PK, hal.1).....	19
Alya: Main Api Terbakar (PK, hal.1)	20
Jangan Biarkan Dia Pulang Begitu Saja, (PK, hal.5)	20
Kapolda: Saya Bukan Malaikat (PK, hal.5).....	20
Saya Bukan Malaikat, Bukan Juga Tuhan (PK, hal. 1 & 7)	21

Selasa, 29 Agustus 2014.....	21
Untung Yoga Minim Prestasi (VN, hal.1).....	21
Polda NTT Lanjut Lidik Kasus TKI (TE, hal.1).....	22
Kapolda-Wakapolda NTT Diganti (PK, hal.1).....	22
DPR-DPD Dukung Rudy Soik (PK, hal.1).....	22
Polri Jangan Geser Masalah (PK, hal.1).....	23
Polda NTT Kehilangan Integritas, (VN, hal.3).....	23
Kapolda NTT Jadi Kasek (hal. 1 & 7).....	23
Senin, 28 Agustus 2014.....	24
Rudy Soik Pembawa Obor (VN, hal.1).....	24
Jurnalis Peduli Masalah <i>Trafficking</i> (VN, hal.1, Editorial).....	25
Ampera “Cium” Kedekatan PT MMP Dengan Orang Polda (PK, hal.1).....	25
Mabes Polri Ambil Alih Aduan Rudy Soik, (PK, Hal.1).....	26
Minggu, 27 Agustus 2012.....	26
Kapolda: Rudy Diduga Sakit Hati (PK, hal.1 &7).....	26
Gelar Kasus di Mabes Polri (PK, hal.1 &7).....	26
Kapolri Panggil Kapolda NTT (VN, hal.3).....	27
Ampera NTT Desak Polda NTT Transparan (VN, hal.3).....	27
Mabes Polri Panggil Direskrimsus Polda NTT (TE, hal.1).....	28
Polri Harus Lindungi Rudy Soik (PK, VN, hal.2).....	28
Rudy: Bila Perlu Jokowi Tahu (PK, hal. 1 & 7).....	28
Polda NTT Klarifikasi, (PK, hal.1).....	29

Tak Penuhi Unsur Pidana (PK, hal.1).....	29
Ampera Tak Biarkan Rudy Sendirian (TE, hal. 1).....	29
Komnas HAM: Jangan Pecat Rudy Soik (TE, hal. 1 & 7)	30
Rudy Soik dan Pemberantasan Mafia TKI (TE, Tajuk Rencana, hal.4).....	30
Senin, 25 Agustus 2014.....	30
Rudy Soik Terancam Dipecat (TE, hal.1)	30
Tiga Pejabat Polda Dimutasi (TE, hal. 1 & 7).....	30
Siapapun Akan Saya Lawan (PK, hal.5).....	31
Sabtu, 23 Agustus 2014.....	31
Dukungan Rudy Soik Meluas (TE, hal. 1 & 7)	31
Pemkot Sosialisasi UU <i>Trafficking</i> (TE, hal.11).....	32
Kamis 21 Agustus 2014	32
LPSK Lindungi Brigpol Rudy Soik (TE, hal 1 & 7).....	32
Dipilih Dipukul Ketimbang Siksaan Makanan Sedikit (TE, hal.12).....	34
Gereja Berperan Hentikan <i>Trafficking</i> (PK, hal.14)	35
Sabtu, 16 Agustus 2014.....	35
Kemerdekaan Itu Bukan Milik Kaum Miskin(VN, hal.3)	35
Rabu, 13 Agustus 2014.....	36
Pemprov Tak Bertaring Tutup PJTKI Nakal (VN, hal.9).....	36
Sabtu, 9 Agustus 2014.....	36
Tindak Tegas Oknum Penyalur TKW Ilegal (VN, hal.9).....	36
Jumat, 8 Agustus 2014	37

BP3TKI Bosan Lapor Kasus TKI ke Polisi (PK, hal.8)	37
TNI AU Amankan Tujuh TKW Ilegal (PK, hal.9).....	37
Disuruh Minum Ramuan Agar Tidak Haid (PK, hal.3)	38
Kami Diminta Telanjang (PK, hal.3).....	38

Daftar Singkatan

AMPERA	: Aliansi Menolak Perdagangan Orang
BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
BP3TKI	: Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BRIGJEN	: Brigadir Jendral
BRIGPOL	: Brigadir Polisi
DIRESKRIMSUS	:Direktorat Reserese Dan Krininal Khusus
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
J-PIT	: Jaringan Perempuan Indonesia Timur
KADIV HUMAS	: Kepala Divisi Hubungan Masyarakat
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KASEPIM	: Kepala Sekolah dan Staf Pimpinan Polri
KOMBESPOL	: Komisaris Besar Polisi
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
LEMDIK	: Lembaga Pendidikan
LPSK	: Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MABES POLRI	: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
PJTKI	: Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PMKRI	: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indoneasia
POKJA MPM	: Kelompok Kerja Menentang Perdagangan manusia
TPDI	: Tim Pembela Demokrasi Indonesia
WAKAPOLDA	: Wakil Kepala polisi daerah

Ringkasan Umum Agustus 2014

DPO IRGSC Edisi Agustus memuat 49 berita terkait perdagangan orang, dan 75% berita terkait kesaksian Brigpol Rudy Soik bahwa atasannya melindungi salah satu PPTKIS, PT.Malindo Mitra Perkasa, dengan menghentikan penyidikan. Berita ini sempat muncul di media nasional, tetapi belum memberikan dampak berarti untuk perubahan dalam tubuh Polri. Perhatian yang diharapkan terkait (1) pengawasan internal, atas menguatnya *managerial secrecy*, (2) maupun terkait minimnya perhatian institusi Polri untuk pengawasan *human trafficking*. Di satu sisi *managerial secrecy* merupakan salah satu bentuk loyalitas dan merupakan budaya umum dalam institusi yang teramat kuat hirarkinya. Tanggapan awal yang muncul dalam kasus Rudy Soik adalah Rudy diancam untuk diberhentikan karena sudah sebulan berhenti kerja (No.35)

Dibandingkan dengan *drug trafficking*, *human trafficking* tidak mendapatkan porsi investigasi yang cukup mendalam dalam tubuh Polri. Meskipun disinyalir, kasus perdagangan orang di Indonesia ada dalam jumlah cukup besar, tetapi yang keluar di media nasional hanya semata terkait berita-berita ekstrim. Sedangkan tindakan preventif amat jarang dibuka. Di tataran legal jaringan PL (Perekrut Lapangan), amat minim yang diseret ke meja hijau, sebab dalih yang diangkat semata 'kesalahan prosedur', dan tidak dibuka lebih jauh.

“Selama ini semua pihak telah bekerja keras dalam menggagalkan TKI ilegal yang hendak di berangkatkan keluar NTT, namun semuanya telah ter-skenario sehingga para korbanpun akan ditangkap kembali dengan perusahaan yang berbeda menjadi fasilitatornya”

Sarah Lery Mboeik, Anggota DPD asal NTT, No.45

Seharusnya munculnya *whistle blower* dari dalam tubuh Polri menjadi momentum untuk mengkaji ulang 'pengetahuan' Polri tentang *human trafficking*. Sebab amat tipis posisi PPTKIS sebagai agen perekrut tenaga kerja, dan pelaku 'perdagangan orang'. Beberapa modus utama seperti pemalsuan umur, jelas-jelas merupakan bentuk perdagangan orang. Kasus Wilfrida Soik, tenaga kerja asal NTT yang sempat dijatuhi

keputusan hukuman mati turut membuka praktek pemalsuan identitas. Usia anak Wifrida dapat dibuktikan dengan adanya surat baptis. Disinyalir jaringan terorganisir yang berintikan para (PL) Perekrut Lapangan ini lah yang juga perlu diberantas, selain memberikan hukuman berat kepada PPTKIS yang leluasa. Tetapi hingga saat ini, tidak terdengar ada PL yang berhasil dihukum di meja hijau.

“Kami sudah bosan menyerahkan kasus-kasus TKI ilegal kepada Polisi karena kasus-kasus TKI hingga saat ini tidak pernah tuntas. Jadi kami akan bina Perusahaan resmi dan TKI ilegal yang di amankan oleh aparat TNI AU ataupun instansi lainnya untuk dilengkapi berkas para TKW sebelum diberangkatkan”

Tito Tiran, BP3TKI, No.46

Kemampuan investigasi merupakan inti dari institusi kepolisian. Di titik ini pengakuan Rudy Soik menjadi penting, karena elemen reserse dan kriminal dalam tubuh Polri harus bersih. Jaringan kriminal yang memanfaatkan institusi publik untuk melakukan tindakan illegal harus dibuka. Saat ini meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa jaringan kriminal perdagangan orang itu ada, tetapi tidak menjadi temuat utama dalam investigasi kepolisian. Bahkan kasus-kasus perdagangan orang yang sudah jelas terbukti tidak berhasil dibuka.

Di Bulan September ini selain masalah munculnya Rudy Soik, salah satu hal menggembirakan yang muncul adalah sosialisasi terkait UU *Trafficking* menyebar hingga institusi pemerintahan (No.39) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang mengingat tingginya angka *trafficking* yang menjadikan Kota Kupang sebagai lokasi transit, maupun oleh masyarakat sipil yang dilakukan melalui J-PIT (Jaringan Perempuan Indonesia TImur) melalui mimbar gereja untuk membuka praktek perdagangan orang di Kefamenanu (No.42).

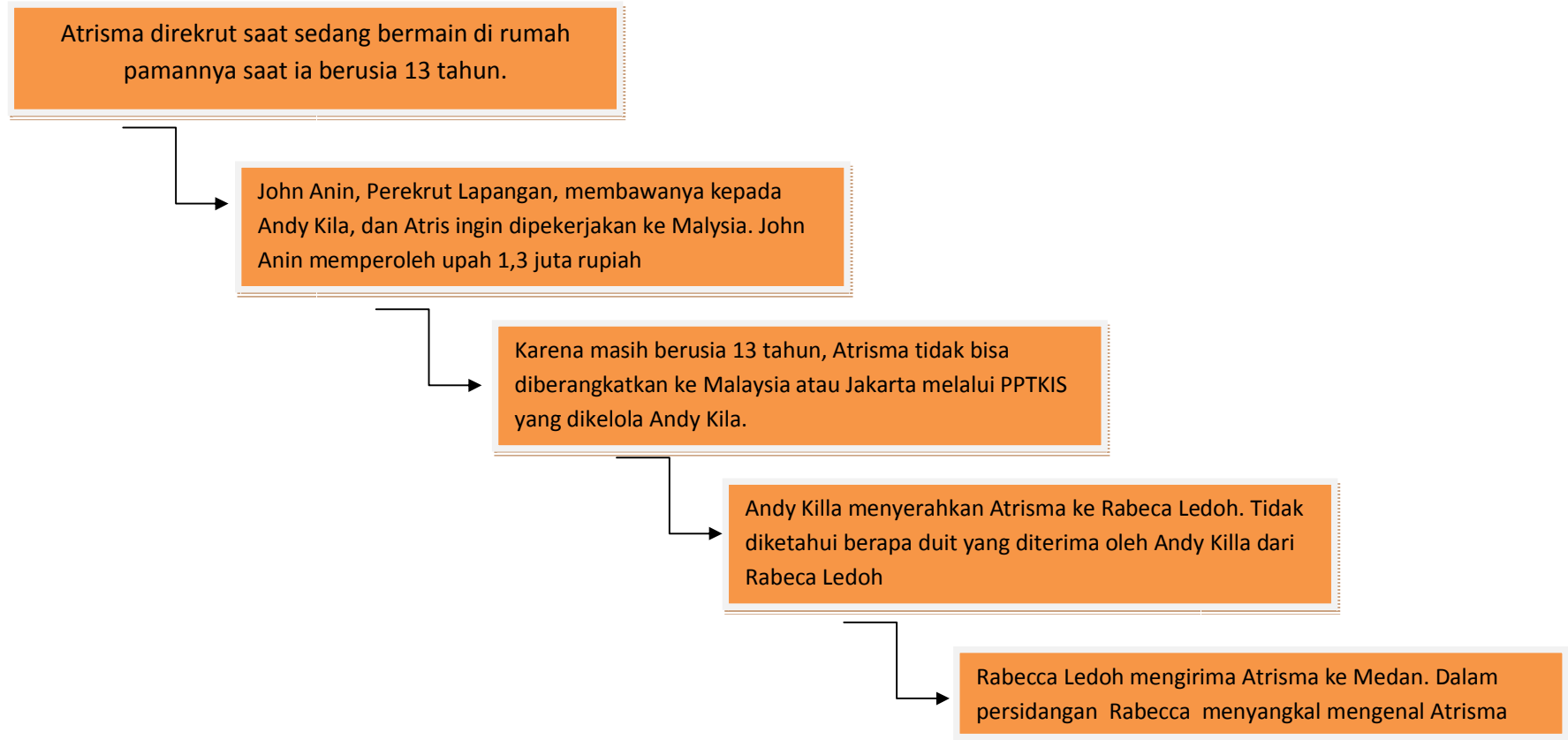
Kasus perbudakan di Medan yang sedang disidang pun juga muncul secara rutin dalam pemberitaan media. Testimoni para korban dibuka ke media dan menunjukkan bentuk penyiksaan yang luar biasa, namun sayangnya hingga kini pelakunya bebas di Medan (No. 41, No.43). Berikut ini salah satu testimoni Eriana Ndoen (No.48 dan No.49):

“Selama 11 bulan saya dan teman-teman bekerja industri sarang burung walet milk Pak Mohar di Medan Sumatra Utara. Rambut kami dicukur botak kami disuruh minum ramuan obat sehingga tidak dapat haid atau datang bulan. Jika kami melawan tidak minum ramuan itu, maka tidak diberi makan malam.

Bahkan, kalau kami mau ke kamar mandi untuk buang air, harus berteriak nama Pak Mohar beberapa kali dan memberitahukan bahwa kami mau ke kamar mandi. Saat berteriak Pak Mohar itu datang dan minta supaya kami telanjang bulat (tanggalkan pakaian, Red) baru masuk ke kamar mandi.

Selama kami di tempat kerja kami tetap di lantai tiga dan siapa saja diantara kami yang hendak ke kamar mandi harus berteriak nama Pak Mohar beberapa kali. Pasti Pak Mohar ada didepan kamar mandi. Kami diminta telanjang dan Pak Mohar lihat kami dan angguk-angguk. Saat itu juga istri Pak Mohar, Haryati turut melihat kami. Begitu lagi kamar mandi kami pintunya tidak ada kunci”

Bagan 1. Alur Rekrutmen Atrisma (Salah seorang Korban Perbudakan di Medan) (No.41)¹



¹ Bagan ini diolah dari berita Harian *Timor Express*, 21 Agustus 2014, 'Dipilih Dipukul Ketimbang Siksaan Makanan Sedikit', Hal.12 Sebagai catatan nama Andy Kila yang disebut orang yang mengantar Atris kepada Rabecca. Umur Atrisma dipalsukan menjadi 22 tahun, dan ia dibuatkan KTP baru oleh Rabecca Ledoh. Nama Andy Kila sendiri dalam catatan diketahui sebagai pimpinan cabang PT.Mahkota Dua Mangga. PTKIS ini didirikan dengan KEP.663/MEN/2006. Dalam SK PTKIS ini beralamat Jl. Batu Ampar III No.18 RT.004/04 Batu Ampar Kramatjati, Jakarta Timur. Penyidikan seharusnya juga diarahkan kepada rantai perdagangan orang ini, mulai dari John Anin hingga Andy Kila Saduk.

Daftar Lembaga Publik yang Perlu Diawasi:

Berdasarkan berita Bulan Agustus 2014, beberapa institusi yang perlu diawasi dalam kasus perdagangan orang antara lain:

1. PT. Angkasa Pura dan TNI AURI (Pengelola Bandara El Tari).

- i. Bandara menjadi penting karena ini menjadi pintu keluar utama dari NTT. Saat ini KP3 tidak ada dalam kawasan Bandara El Tari, sehingga untuk pengawasan hanya bisa bertumpu pada PT.Angkasa Pura maupun AURI. Di titik ini mekanisme pengawasan yang disepakati perlu dibangun.

2. Agen Pembelian Tiket.

- i. Deteksi KTP palsu yang dipakai untuk pembelian tiket bisa dimulai dari tingkat agen hingga pembelian langsung ke maskapai penerbangan. Khusus untuk maskapai penerbangan Gugus Tugas perlu mengusulkan kerjasama dengan maskapai penerbangan Lion Air, untuk lebih memperhatikan data penumpang yang menggunakan jalur penerbangan daerah tujuan Medan, Batam, dan Palembang. Untuk daerah tujuan Jakarta, tentu cukup kesulitan, karena ini termasuk jalur padat penumpang.

3. BP3TKI

- i. Kerja BP3TKI di NTT secara khusus perlu di-evaluasi, karena mekanisme pengawasan PPTKIS yang bermasalah tidak cukup jelas, minimal dari sisi pendataan. CTKI yang ditahan di 'pintu keluar' Provinsi NTT, semacam di Banda Udara El Tari dibiarkan begitu saja tanpa mekanisme pendataan yang memadai. Akibatnya upaya preventif tidak pernah jelas dilakukan.

PTKIS Bermasalah Bulan September 2014

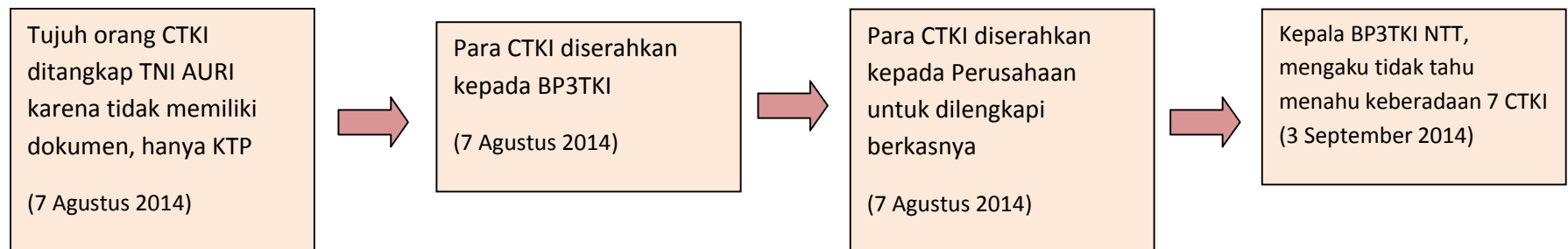
1. PT.Surya Jaya utama Abadi (No 44, No.45,No.46, dan No.47)

- a. Profil PPTKIS: PPTKIS ini didirikan di Pati, Jawa Tengah dengan nomor Kep. 56 / MEN / 2003. PT. SURYA JAYA UTAMA ABADI adalah spesialis pemberangkatan para Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia. Daerah rekrutmennya selain NTT, adalah Jawa Timur²
- b. Alamat di Kupang: Jalan Bajawa, RT 04/RW 11, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
- c. Staf lokal: Adi Sasi
- d. Rute pemberangkatan tahun 2014: Kupang-----→Jakarta-----→Palembang-----→Malaysia

² <http://ptsjua.blogspot.com/> [Diakses Tanggal 10 Desember 2014]

- e. Catatan kriminal: PT.Surya Jaya Utama Abadi memiliki catatan kriminal terkait perdagangan orang dan tidak sempat diadili. Bahkan korban perdagangan orang pada tahun 2013, hingga saat ini masih tanpa kabar berita, dan tidak diketahui nasibnya di Medan. Korban yang diketahui adalah Palestina, warga Kampung Solor, namun ia berhasil melarikan diri dan dipulangkan. Sedangkan korban yang lain Saprina (16) asal Kefa, NTT, Siska (21) asal Alor, NTT, Yanti (27) asal Alor, NTT, Emi (27) asal Alor, NTT, Yeni (22) asal Oepura Kupang, NTT hingga kini tidak diketahui nasibnya. ³
- f. Nama para korban CTKI tanpa dokumen: Meliana Kamlasi (22) asal Manumuti, Kabupaten Malaka Adama Magdalena Meni (33) asal Oelpuah, Kabupaten Kupang Yumince Sanam (33) asal Takari, Kabupaten Kupang; Jeniance Eriana Sone (29) asal Takari, Kabupaten Kupang; Irmayati Abanat (21) asal Amarasi, Kabupaten Kupang; Asti Dorotia Nesimnasi (21) asal Takari, Kabupaten Kupang; dan Veronika Hoar (29) asal Ayotupas, Kabupaten TTS.⁴
- g. Skema pengawasan BP3TKI NTT tergolong lemah, dan terbukti tidak efisien. Para CTKI yang ditangkap TNI AURI di Bandar Udara El Tari kemudian dibiarkan begitu saja. Bahkan Kepala BP3TKI Tito Tiran, tidak mengetahui kemana nasib para CTKI yang ditangkap. Diduga kuat mereka telah diberangkatkan kembali. Bagan 2 di bawah ini menjelaskan bagaimana kerja BP3TKI. Dari sisi akuntabilitas, BP3TKI seolah tidak memiliki 'otoritas' terhadap PPTKIS. BP3TKI juga tidak memiliki mekanisme administrasi yang memadai untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten. Misalnya untuk memeriksa apakah para CTKI yang ditahan di 'pintu keluar' (baca: bandara) telah dipulangkan atau tidak. Jika dipulangkan 'apakah korban tiba dengan selamat atau tidak' di kampung. Dengan mekanisme administrasi berjaringan yang sederhana, seharusnya BP3TKI mampu mendapatkan konfirmasi.

Bagan 2. Skema Kerja BP3TKI Tidak Jelas



³ <http://indonesiarayanews.com/news/nusantara/05-22-2013-18-00/perempuan-ntt-korban-trafficking-itu-akhirnya-pulang> [Diakses Tanggal 10 Desember 2014]

⁴ <http://www.vnewsmedia.com/pt-surya-jaya-sudah-pulangkan-tujuh-tkw-ilegal/> [Diakses tanggal 10 Desember 2014]

Nusantara

Perempuan NTT Korban Trafficking Itu Akhirnya Pulang

@IRNewscom | Medan : SEORANG wanita asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Palestina (23), korban trafficking yang berhasil kabur dari PJTKI PT Surya Jaya Utama Abadi Jalan Sempurna No 93 Medan, Rabu (22/05), akhirnya kembali ke kampung halamannya.

Dia pulang, berkat bantuan dari masyarakat Jalan Turi, Kelurahan Binjei, Kecamatan Medan Denai, Medan, yang membantu membelikan tiket pesawat untuknya.

"Hari ini Palestina sudah berangkat ke kampungnya di Solor, Kupang, NTT. Kami berharap dia bahagia bisa kembali," ungkap Ali Abrar (51), salah satu orang dituakan di Denai, Medan.

Menurutnya, Palestina berangkat menggunakan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 696 dari Medan dan transit di Surabaya, kemudian melanjutkan penerbangan menggunakan pesawat Lion dengan nomor penerbangan JT970 tujuan Kupang, NTT.

"Kami sudah telepon ibunya Halimah, dan nanti akan dijemput di Bandara NTT," katanya.

Sementara itu, Hasnah (41), salah satu warga yang mengantarnya ke Bandara International Polonia Medan, mengatakan, setibanya di NTT, pihak keluarga akan langsung ke Polda disana, untuk melaporkan kejadian menimpa Palestina. Perempuan tersebut hingga saat ini masih trauma berat akibat penganiayaan yang dialaminya selama dipenampungan PJTKI PT Surya Jaya Utama Abadi Jalan Sempurna No 93 Medan.

Hasnah mengatakan, nanti akan dilaporkan soal keberadaan lima warga NTT yang belum diketahui. Mereka adalah Saprina (16) asal Kefa, NTT, Siska (21) asal Alor, NTT, Yanti (27) asal Alor, NTT, Emi (27) asal Alor, NTT, Yeni (22) asal Oepura Kupang, NTT.

"Polda NTT harus tegas dan mau mengusut dan mencari lima sahabat Palestina yang belum diketahui rimbanya," katanya.

Gambaran kasus di atas menunjukkan bahwa BP3TKI tidak memiliki sistem dokumentasi yang baik tentang PPTKIS yang diawasinya, sehingga cukup mengherankan BP3TKI melepaskan begitu saja PPTKIS yang jelas-jelas melakukan *human trafficking*.

Posisi Berbagai Institusi terhadap Rudy Soik (*Whistleblower Kasus Human Trafficking*)

Salah satu hal menarik terkait munculnya pengakuan Brigpol. Rudy Soik ke publik adalah melihat ulang komentator yang dipilih awak media untuk menjadi juru bicara kasus ini. Ungkapan Rudy Soik ditanggapi beragam oleh berbagai institusi, antara lain:

- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban):
 - Di Bulan Agustus 2014, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diwakili Edwin Partogi mengatakan, Polri perlu memberikan perlindungan kepada Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik karena jika hukuman dijatuhkan ini akan membuat whistleblower lain dari tubuh Polri mundur. (No.1)
 - Di tingkat ‘ucapan’, LPSK sepertinya memberikan jaminan, dan rasa aman, tetapi peran LPSK sangat terbatas ketika orang yang ingin dilindungi datang dari dalam POLRI. Sebab elemen LPSK sendiri datang dari kepolisian, dan terkait hal ini LPSK belum memiliki mekanisme untuk melindungi whistleblower yang menjadi elemen LPSK Itu sendiri.
- Bareskrim Mabes Polri dan Propam Mabes Polri
 - Untuk membuka kasus ini pada tanggal 26 Agustus Polri mengadakan gelar kasus di Bareskrim Mabes Polri, karena diduga 26 dari 52 orang CTKI tidak memiliki dokumen, dan tanggal 27 Agustus Kaplri memanggil Kapolda NTT untuk memberikan penjelasan. Sayangnya sikap Mabes Polri mendua dalam memutuskan hasil gelar perkara. Hal ini ditunjukkan oleh Bareskrim dan Divisi Propam dari Mabes Polri:
 - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menilai disposisi Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT Kobespol Mochammad Slamet agar penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan perdagangan orang yang diduga melibatkan PT. Malindo Miktra Perkasa dihentikan sebagai disposisi yang salah. (28 Agustus 2014, No.2)
 - Sehari kemudian, pernyataan muncul Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Propam) (Mabes Polri) yang ‘mengklarifikasi’ alias ‘meralat pernyataan Bareskrim sehari sebelumnya. Perubahan pernyataan sikap itu disampaikan oleh Direskrimum, Kombespol. Sam Kawengian, di Mapolda NTT, Jumat (29 Agustus 2014). (No.7).

- Dua sikap yang berbeda ini menunjukkan adanya ‘friksi internal’ di dalam tubuh Polri dalam menyikapi persoalan ini, antara Bareskrim maupun Propam. Selain itu pernyataan yang dikutip oleh surat kabar setempat tidak datang langsung dari bagian Propam Mabes Polri, sehingga ‘pernyataan asli’ dari bagian Propam tidak ada.
- Kapolda NTT (Brigjen. Polisi I Ketut Untung Yoga Ana)
 - Ketidakmampuan untuk menempatkan pentingnya *whistleblower* untuk pembaruan institusi terlihat dari komentar Kapolda NTT, yang menyatakan bahwa ‘pelaporan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mochammad Slamet, oleh anak buahnya, Brigpol Rudy Soik, kepada Komnas HAM lantaran sakit hati, dan dugaan itu muncul setelah dia mengetahui bahwa Rudy telah dipindahkan ke Polres Timor Tengah Selatan (TTS)’. (No.23) Persoalan yang ditangkap semata yang ada di permukaan, soal relasi sepele antara atasan-bawahan, dan tidak mampu ditarik lebih jauh sebagai momentum untuk melakukan kritik ke dalam, dan pembenahan institusi, terutama untuk membukan jaringan peredaran orang yang sudah begitu akut.
 - Kapolda NTT Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan sampai saat ini ia belum menerima laporan hasil gelar perkara kasus 52 orang (TKI) yang di rekrut PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) di Bareskrim Mabes Polri. Polda NTT sementara menunggu hasil gelar perkara tersebut. “Saya tidak ikut gelar (perkara) di Mabes Polri. Pihak yang mengikuti gelar itu belum melaporkan kepada saya apa hasilnya,” ujar Kapolda Untung Yoga, Sabtu (30/8/2014) siang. (No.3)
- Kapolri
 - Pada tanggal 27 Agustus 2014, Kapolri Jendral Sutarnan memanggil Kapolda NTT Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana bersama Perwira utama di Mapolda NTT Untuk Mengklarifikasi Persoalan penjualan manusia yang di ungkapkan salah satu mantan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT Brigpol Rudy Soik . (No.25)
- PT.Malindo Mitra Perkasa (PT.MMP)
 - Direktur Utama PT Malindo Mitra Perkasa (MMP), Aryanisti Sulhanita PB mengatakan bahwa PT.MPM tidak terlibat dalam kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal NTT. (28/98/2014, N0.8)
- TPDI
 - TPDI meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT menuntut penjelasan Kapolda NTT, Untung Yoga Ana, terkait berbagai kasus yang ditangani dalam wilayah hukum Polda NTT termasuk didalamnya kasus dugaan perdagangan

manusia yang berbuntut saling lapor atasan dan bawahan. Sebab mutasi dilihat sebagai bentuk memutus rantai kasus sehingga Penjelasan perlu diutarakan kepada public sebelum pindah. (No.12)

- DPR dan DPD RI (asal NTT)
 - Anggota DPR RI Fary Dj Francis dan anggota DPD Sarah Lery Mboeik, mendukung sepak terjang anggota Polda NTT, Brigpol Rudy Soik, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. Pada Kamis, (28/8/2014) dua wakil rakyat NTT itu menerima kunjungan Brigpol Rudy Soik di sekretariat DPRD RI Jakarta. (No.15)
- Pokja MPM
 - Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) yang mendampingi salah satu penyidik polda NTT, Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, yang melaporkan Komandannya, meminta polri jangan mengeser masalah utama perdagangan manusia menjadi sekedar masalah administrasi dan internal Polri. (No.16)
- PMKRI
 - PMKRI menyatakan bahwa 'Institusi Kepolisain Daerah (Polda) NTT telah kehilangan integritas bahkan oknum perwira NTT di duga terlibat dalam mafia penjualan manusia, disinyalir tidak lagi memiliki hati nurani'. (No.17)
- Asosiasi Jurnalis Peduli Trafficking
 - Para wartawan dan jurnalis membentuk wadah khusus untuk menyoroti praktek perdagangan orang. Hal ini ditunjukkan dengan 'sekitar 60-an orang jurnalis dari media cetak maupun elektronik berkumpul di ruang rapat komisi A DPRD NTT dengan menggelar diskusi terkait insan pers terhadap maraknya Praktek *trafficking* yang terjadi di NTT. Hasil dari diskusi tersebut membentuk gerakan dari jurnalis peduli *trafficking* dengan koordinator Heri Batileo dan sekretaris Chris Parera.'(No.20)
- Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang)
 - Aliansi Melawan Perdagangan orang (Ampera) NTT mencium adanya kedekatan khusus antara PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) dengan orang dalam lingkungan Polda NTT. Koordinator AMPERA NTT, Paul Sinlaeloe, SH kepada Pos Kupang, Rabu (27/8/2014), mengatakan pihaknya melihat dan patut meduga adanya kedekatan alias hubungan yang tidak biasa antara PT MMP sebagai perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI) dengan orang-orang dalam institusi Polda NTT. Dugaan ini dugaan ini berdasarkan penelusuran sementara dan berdasarkan tulisan yang dipublikasi itu Pos Kupang setahun lalu, tepatnya tanggal 3 Juli 2013 terkait acara HUT Ke-67 Bhayangkara di stadion. Ricky HP Sitohang, Senin (1/7/2013) malam. (No.21)
- Komnas HAM

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rupanya tidak main-main dalam mendukung Brigpol Rudy Soik. “Propam Mabes Polri sudah saya minta bahwa maksud baik Rudy Soik itu sebagai bagian dari pembenahan institusi polisi. Yang jelas, Rudy Soik itu membongkar jaringan *trafficking* di NTT,” tandas Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigay kepada Timor Ekspres (Fajar Media Center) di Jakarta, Senin (25/8).
- Formadda NTT
 - Forum Pemuda NTT Pengerak Perdamaian dan Keadilan (Formadda NTT) menyatakan dukungan atas langkah berani anggota polisi Brigadir Rudy Soik. Hal ini diungkapkan oleh Pater Yohanes Kristo Tara OFM) di Atambua. (No.28)

Dari pembacaan persoalan terlihat bahwa gambaran dasar tentang ‘kejahatan terorganisir’ terkait perdagangan manusia tidak dimiliki oleh Polri. Sehingga kehadiran *whistleblower* berpangkat rendah lebih dianggap sebagai anggota yang tidak loyal terhadap institusi Polri, daripada dianggap sebagai tanda ‘peringatan untuk Polri’. Sehingga pertanyaan diawal laporan ini ‘siapa mengontrol polisi’ menjadi amat relevan dan perlu dijawab bersama.

Kritik dari daerah pinggiran Indonesia yang ditujukan kepada Polri memang acap kali dianggap utopis, tetapi di titik itu lah riset aksi ini dijalankan. Mengkaji kenyataan, mencatat fakta, berimajinasi seluasnya, dan mencoba membayangkan kemungkinan yang saat ini tidak mungkin.

Ringkasan Berita

No	Hari/Tanggal	Berita (suratkabar, halaman)	Ringkasan Berita
1	Minggu, 31 Agustus 2014	LPSK: Polri Harus Jamin Rudy Soik (PK, hal. 1 & 7)	Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi mengatakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memberikan jaminan tidak menjatukan sanksi terhadap Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik karena di khawatirkan akan memudahkan keberanian petugas lainnya untuk mengungkap dugaan adanya penyelewengan yang terjadi di lingkungan kerjanya. "LPSK meminta kepada kepolisian untuk tidak menjatuhkan Rudy Soik Karena keberaniannya membongkar dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya," Tegas Edwin dalam rilis LPSK yang di terima antara di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
2		Bareskrim Salahkan Disposisi Kombes MS (PK, hal.1 & 7)	Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menilai disposisi Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT Kobespol Mochammad Slamet agar penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan perdagangan orang yang diduga melibatkan PT. Malindo Miktra Perkasa adalah disposisi yang salah. Demikian salah satu hasil gelar perkara di Mabes Polri oleh Bareskrim terkait laporan Brigpol Rudy Soik terhadap atasanya Komisariss Besar (Kombespol) Mochammad Slamet (MS), di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
3		Kapolda Merasa Dilangkahi, (PK, hal.1 & 7)	Kapolda NTT Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana, mengatakan sampai saat ini ia belum menerima laporan hasil gelar perkara kasus 52 orang (TKI) yang di rekrut PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) di Bareskrim Mabes Polri. Polda NTT sementara menunggu hasil gelar perkara tersebut. "Saya tidak ikut gelar (perkara) di Mabes Polri. Pihak yang mengikuti gelar itu belum melaporkan kepada saya apa hasilnya," ujar Kapolda Untung Yoga, Sabtu (30/8/2014) siang.

4	Sabtu, 30 Agustus 2014	Aktivist LSM Tetap Pantau Kasus Rudy (VN, hal.1)	Para aktivis berbagai LSM di NTT akan tetap memantau perkembangan kasus yang dilaporkan Brigpol Rudy Soik di Mabaes Polri, Komnas HAM, dan beberapa LSM di Jakarta. Salah satu penyidik pembantu pada Direskrimsus Polda NTT itu melaporkan atasannya, Direskrimsus Polda NTT, Kombespol Mochammad Slamet yang menghentikan penyelidikan kasus <i>human trafficking</i> tanpa alasan yang patut sesuai aturan. Pemantauan bertujuan agar apa yang dilaporkan dapat diselesaikan, dan Rudy sendiri tidak menjadi korban karena mengungkap borok di institusinya. Koordinator Ampera NTT, Paul Sinlaeoe menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat dan LSM yang tergabung dalam Ampera akan terus mengawal kasus perdagangan manusia yang sedang di perjuangkan Rudy Soik. "Kita harus kawal agar semua berjalan sesuai aturan. Kalau memang Rudy merasa terancam, Ampera akan bicara dan usahakan Perlindungan," tegasnya menjawab VN, Jumat (29/8).
5		Menanti Polda Bersih Diri, VN (hal.1 editorial)	Pergantian di pucuk pimpinan di jajaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT dan juga sejumlah Perwira Menengah Polda NTT kali ini cukup menyita perhatian publik. Karena mutasi itu terjadi di tengah mencuatnya kasus Brigpol Rudy Soik melawan Direktur Kriminsus Polda NTT Kombespol Mochammad Slamet. Bantahan yang sudah dilayangkan Humas polda NTT bahwa bersih-bersih di tubuh polda NTT tersebut tak ada hubungannya dengan laporan Brigpol Rudy Soik ke Mabas Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan Ombudsman RI justru bantahan itu semakin membuat publik bertanya-tanya.
6		Nasib Brigpol Rudy di Tangan Kapolres TTS (PK, hal.1)	Nasib Brigpol Rudy Soik pasca melaporkan mantan atasannya, Kombespol Moch Slamet, ke Komnas HAM dan Ombudsman RI, berada di tangan Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS). Pasanya Kapolres TTS merupakan atasan langsung Brigpol Rudy Soik saat ini. Demikian disampaikan Kapolda NTT, Brigadir Jendral Polisi I Ketut Untung Yoga, melalui Kabid Humas AKBP Okto Riwu, Kepada Pos Kupang, Jumat (29/8/2014) siang, Okto menuturkan Kapolres TTS selaku atasan langsung berhak menentukan apakah Brigpol Rudy Soik mendapatkan penghargaan atau sanksi terkait laporannya ke komnas HAM dan Ombudsman.
7		Mabas Polri Klarifikasi (PK, hal.1)	Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia

			(Mabes Polri) telah mengklarifikasi laporan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik terkait penghentian penyelidikan kasus 52 calon Tenaga Kerja Indonesia yang ditampung PT Malindo Mitra Perkasa (MMP). Hasil Klarifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan Propam Maber Polri menunjukkan tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Sam Kawengian, mengatakan hal itu di Mapolda NTT, Jumat (29/8/2014).
8		Alya: Main Api Terbakar (PK, hal.1)	Direktur Utama PT Malindo Mitra Perkasa (MMP), Aryanisti Sulhanita PB Alias Alya angkat bicara. Alya menyatakan perusahaannya tidak terlibat dalam kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal asal NTT. Jika terlibat, tegas Alya, sudah pasti perusahaannya tidak lagi beroperasi di Jakarta dan NTT. Namun buktinya, hingga kini perusahaannya masih tetap eksis merekrut TKI dari NTT. “Kalau main api nanti kena asapnya dan terbakar,” kata Alya saat dihubungi melalui telepon genggamnya dari Kupang ke Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/8/2014) siang.
9		Jangan Biarkan Dia Pulang Begitu Saja, (PK, hal.5)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT diminta segera meminta penjelasan Kapolda NTT, Untung Yoga Ana, terkait berbagai kasus yang di tangani dalam wilayah hukum Polda NTT yang tidak tuntas termasuk kasus dugaan perdagangan manusia yang berbuntut saling lapor atasan dan bawahan. Penjelasan itu harus di sampaikan sebelum Kapolda Untung Yoga Ana meninggalkan NTT lantaran telah dimutasi ke tempat tugas yang baru. Hal ini di sampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus melalui ponselnya, Jumat (28/8/2014). Dikatakanya kapolda merupakan jabatan publik, karena itu tidak ada salahnya DPRD sebagai representasi rakyat NTT berhak meminta penjelasannya.
10		Kapolda: Saya Bukan Malaikat (PK, hal.5)	Kapolda Untung Yoga Ana kepada wartawan usai mengikuti rapat dengan Gubernur NTT di kantor Gubernur NTT, Jumat (29/8/2014) mengaku sudah mendapat informasi terkait mutasi dirinya ke tempat tugas baru. “Ya saya ikut rombongan Pati (Perwira tinggi). Setibanya tanggal 3 September,” jawabnya. Dia menolak mengait ngaitkan dirinya dengan kasus saling lapor atasan dan

			<p>bawahan di Polda NTT terkait kasus dugaan perdagangan manusia.“ kata siapa? Yang jelas saya tidak tahu. Kalau mau ngarang-ngarang sendiri tanggung jawab sama Tuhan. Itu kan memang enak untuk berita koran, silahkan tanggungjawab sendiri,” ujarnya. Terkait adanya penilaian bahwa dirinya tidak berprestasi, Untung Yoga Ana mengaku siap menerima apapun penilaian masyarakat NTT karena penilaian itu tergantung siapa yang menilai dirinya sebagai yang di nilai. “Jangan tanya kepada yang di nilai, yang menilai masyarakat termasuk anda. Kalau anda bilang saya tidak bisa, ya saya terima. Emangnya saya mau menolak? Kan anda yang menilai saya. Dan saya bukan malaikat, bukan Tuhan. Saya ke sini menyerahkan diri begini apa adanya, saya bukan sempurna itu yang bisa saya lakukan,” jelasnya.</p>
11		<p>Saya Bukan Malaikat, Bukan Juga Tuhan (PK, hal. 1 & 7)</p>	<p>Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT, Brigjen Pol. Ketut Untung Yoga Ana dengan tegas mengatakan bahwa proses mutasi Perwira tinggi (Pati) di lingkungan polri murni program Mabes Polri. Bukan karena adanya aduan dari Brigpol Rudy Soik ke Komnas HAM, LPSK, Ombudsman RI, dan lembaga lainnya. Karena itu Untung Yoga mengatakan dirinya akan resmi berpidah tugas dan menjabat sebagai Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan (Kasekpim) Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri yang bertempat di Lembang Bandung. “Jika anda (Wartawan, <i>Red</i>) menilai kalau mutasi ini terkait dengan pengaduan Rudy Soik itu dosa anda. Saya tegaskan saya bukan malaikat, bukan juga tuhan. Jadi setiap penilaian untuk saya, saya akan terima,” ungkap Untung Yoga kepada Koran ini usai pertemuan Forkompimda NTT dengan Dirjen Kesbangpol Kemdagri di ruang kerja Gubernur NTT, Jumat (29/8).</p>
12	<p>Selasa, 29 Agustus 2014</p>	<p>Untung Yoga Minim Prestasi (VN, hal.1)</p>	<p>Selama dua tahun mengemban tugas sebagai Kapolda NTT, Brigjen Pol. I Ketut Untung Yoga Ana di nilai tidak banyak memiliki prestasi khususnya penuntasan kasus yang mencuat. Sebut saja kebakaran Kantor Gubernur NTT, pemblokiran Bandara Turlelo oleh Bupati Ngada Marianus Sae, <i>human trafficking</i>, perjudian, demo anggota terhadap Kapolres Manggarai atau dana Bansos NTT yang tidak jelas arahnya. Penilaian tersebut di kemukakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Pertus Salestinus kepada VN, Kamis (28/8) menyikapi di</p>

			mutasinya I Ketut Untung Yoga Ana dari Kapolda NTT menjadi Kepala Sekolah dan Staf Pimpinan Polri (Kasespim) Polri.
13		Polda NTT Lanjut Lidik Kasus TKI (TE, hal.1)	Pengaduan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terkait penghentian penyidikan kasus dugaan perdagangan orang terhadap 52 calon tenaga kerja asal NTT yang di rekrut PT. Malindo Mitra Perkasa (MMP) oleh Direktorat Reserse dan Krininal Khusus (Direskrimsus) beberapa waktu lalu membawa titik terang. Setelah melalui proses gelar perkara di Badan Reserse dan kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Rabu, (27/8) dimana dihadiri Direskrimsus Polda NTT, Kombespol Mochammad Slamet dan Brigpol Rudy Soik didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, di putuskan bahwa tindakan menghentikan kasus itu oleh Direskrimsus Polda NTT terlalu prematur. Atas keputusan tersebut Polda NTT melalui Kepala Kabid Humas, AKBP Okto Riwu menyatakan siap melanjutkan kasus tersebut.
14		Kapolda-Wakapolda NTT Diganti (PK, hal.1)	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memutasi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTT Brigadir Jendral (Brigjen) I Ketut Untung Yoga Ana dan Wakil Kapolda (Wakapolda) NTT Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Monang Manulang. Brigjen Untung Yoga Ana diganti Brigjen Polisi Endang Sunjaya yang sebelumnya menjabat Wakapolda Aceh sementara Kombespol Monang Manulang diganti dengan Kombespol Sumartono Jochanan, yang sebelumnya menjabat Sespusinafis Bareskrim Mabes Polri.
15		DPR-DPD Dukung Rudy Soik (PK, hal.1)	Anggota DPR RI Fary Dj Francis dan anggota DPD Sarah Lery Mboeik, mendukung sepak terjang anggota Polda NTT, Brigpol Rudy Soik, untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. Pada Kamis, (28/8/2014) dua wakil rakyat NTT itu menerima kunjungan Brigpol Rudy Soik di sekretariat DPRD RI Jakarta. "Tadi Brigpol Rudy ketemu saya dan ibu Sarah. Dia sedang berada di Jakarta dan bertemu kami untuk memberinya penguatan. Sebagai Wakil Rakyat NTT, saya mengatakan mendukung pak Rudy untuk mendukung kebenaran dan keadilan. Apa yang diperjuangkan sudah benar sehingga memang patut didukung," ujar Fary Francis yang di hubungi melalui telepon, Kamis

			(28/8/2014) malam.
16		Polri Jangan Geser Masalah (PK, hal.1)	Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) yang mendampingi salah satu penyidik polda NTT, Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, yang melaporkan Komandannya, meminta polri jangan mengeser masalah utama perdagangan manusia menjadi sekedar masalah administrasi dan internal Polri. Pokja MPM memberi apresiasi atas gelar kasus yang menghadirkan Brigpol Rudy Soik dan sejumlah Pimpinan Polri dan Polda NTT. Namun, Pokja MPM mendesak polri agar tidak mengeser persolan utama menyangkut mafia perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) menjadi sekedar masalah administratif dan internal polri saja,” demikian permintaan Pokja MPM yang di terima Pos Kupang melalui surat elektronik (<i>email</i>), Kamis (28/8/2014) sore.
17		Polda NTT Kehilangan Integritas, (VN, hal.3)	Institusi Kepolisain Daerah (Polda) NTT di nilai telah kehilangan itegritas bahkan oknum perwira NTT di duga terlibat dalam mafia penjualan manusia, di sinyalir tidak lagi memiliki hati nurani. Untuk itu Kepala Kepolisian Daerah NTT diminta untuk menindak tegas oknum anggota Perwira Polda NTT yang kuat dugaan merupakan jaringan penjualan manusia di NTT. Penilaian itu terungkap dalam orasi mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Kupang saat menggelar aksi solidaritas yang digelar didepan pintu masuk Mapolda NTT, Kamis (28/8). Aksi tersebut dikawal ketat anggota Brimob Polda NTT, tapi Kapolda NTT maupun Perwira di Markas Polda NTT tersebut tidak menemui para mahasiswa tersebut.
18		Kapolda NTT Jadi Kasek (hal. 1 & 7)	Polri kembali melakukan rotasi di lingkungannya. Kali ini perputaran kepemimpinan ada di tingkat perwira tinggi atau polri, mulai dari para pati berbintang satu atau dua. Rotasi tersebut berdasarkan surat telegram kepolisian Nomor: ST/1687/VII/2014, tanggal 27 Agustus 2014. Diantara rotasi tersebut, beberapa Kapolda mengalami pergantian kepemimpinan. Misalnya Kapolda NTT Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Kapolda Sumatra Utara (Sumut) Kapolda Riau, Jambi dan Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jatim. Informasi yang diperoleh Jawa Pos, Kapolda Metro Jaya

			<p>dan Jatim digeser posisinya. Kapolda Metro Jaya Irjen Dwi Priyatno bakal mengisi posisi Irwasum yang ditinggalkan Komjen Anton Bachrul Alam. Anton bakal pensiun per 1 September mendatang. Posisi Kapolda Metro Jaya bakal digantikan oleh Kapolda Jatim Irjen Unggung Cahyono. Untuk tongkat komando Kapolda NTT yang saat ini dipegang Brigjen Pol. I Ketut Untung Yoga Ana akan berpindah ke tangan Brigjen Pol. Endang Sunjaya yang saat ini menjabat Wakapolda Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Endang yang baru menjabat lima bulan di provinsi paling barat Indonesia itu harus bergeser ke NTT. Kemana Brigjen Untung Yoga? Sosok yang sebelum ke NTT menjabat Wakapolda Bali itu akan mengisi pos baru sebagai Kepala Sekolah (Kasek) Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri. Selanjutnya, di Polda Sumut, Kapolri merotasi Kapolda Irjen Syarief Gunawan menjadi Staf Ahli Kapolri bidang Sosial Budaya. Posisi Kapolda Sumut digantikan Irjen Eko Hadi Sutedjo yang saat ini dipercaya menjadi Gubernur Akpol. Di Provinsi Kepri yang semula dipimpin Brigjen Endang Sudrajat akan digantikan Brigjen Arman Depari yang saat ini menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri. Sementara pejabat lama dalam masa persiapan pensiun. Posisi Gubernur Akpol selanjutnya ditempati Irjen Pudji Hartanto. Pudji sendiri selama ini dipercaya memimpin Korlantas Polri. Dan posisi Pudji akan diisi Brigjen Condro Kirono yang saat ini menjabat Kapolda Riau. Jabatan yang ditinggalkan Condro sebagai Kapolda Riau akan diisi Brigjen Dolly Bambang Hermawan yang sebelumnya menjadi Kepala Biro Pengendalian Personel SDM Polri. Kapolda Jambi Brigjen Satria Hari Prasetya digantikan oleh Brigjen Bambang Sudarisman. Sementara Kapolda Kalimantan Timur akan diisi Irjen Andayono yang menjabat sebagai Wakil Irwasum. Posisi Wakil Irwasum akan digantikan oleh Dicky Atotoy. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Ronny Franky Sompie, mengatakan, mutasi ini berjalan wajar dan tidak dikarenakan ada hal yang negatif." Dari mutasi jabatan ini tidak ada indikasi karena masalah negatif, semua berjalan wajar," kata Ronny kepada JPNN, Kamis (28/7) dini hari.</p>
19	Senin, 28	Rudy Soik Pembawa Obor (VN, hal.1)	Entah mengapa manusia makin lama makin bertindak tidak manusiawi,

	Agustus 2014		rupanya keyakinan para penganut aliran pesimisme terhadap manusia tidak keliru dengan mengatakan bila pada dasarnya manusia itu jahat yang membuat baik adalah hukum dan hukuman. Hebohnya aksi heroik Brigpol Rudy Soik mantan penyidik pembantu di satuan Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT, sepekan ini cukup meyakinkan kita. Jika manusia tidak ramah terhadap sesamanya. Manusia lainpun bisa menjadi aset untuk di jual. Rudy seakan membuka katup aliran busuk kenyataan lama tentang penjualan manusia di NTT yang diperhalus dengan ungkapan pengiriman tenaga kerja. Alhasil, bukannya dikirim tetapi dijual super murah oleh penyalur untuk meraup keuntungan.
20		Jurnalis Peduli Masalah <i>Trafficking</i> (VN, hal.1, Editorial)	Jurnalis atau insan pers di NTT menunjukkan kepedulian terhadap semua persoalan mafia <i>trafficking</i> atau perdagangan manusia yang ada di NTT. Sorotan jurnalis NTT terhadap masalah perdagangan manusia tersebut diwujudkan dengan membangun Gerakan Jurnalis NTT Peduli <i>trafficking</i> . Pantauan VN, Rabu, (27/8) siang 60-an orang jurnalis dari media cetak maupun elektronik berkumpul di ruang rapat komisi A DPRD NTT dengn menggelar diskusi terkait insan pers terhadap maraknya Praktek <i>trafficking</i> yang terjadi di NTT. Hasil dari diskusi tersebut membentuk gerakan dri jurnalis peduli <i>trafficking</i> dengan koordinator Heri Batileo dan sekretaris Chris Parera.
21		Ampera “Cium” Kedekatan PT MMP Dengan Orang Polda (PK, hal.1)	Aliansi Melawan Perdagangan orang (Ampera) NTT mencium adanya kedekatan khusus antara PT Malindo Mitra Perkasa (MMP) dengan orang dalam lingkungan Polda NTT. Koordinator AMPERA NTT, Paul Sinlaeloe, SH kepada Pos Kupang, Rabu (27/8/2014), mengatakan pihaknya melihat dan patut meduga adanya kedekatan alias hubungan yang tidak biasa antara PT MMP sebagai perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI) dengan orang-orang dalam institusi Polda NTT. Dugaan ini dugaan ini berdasarkan penelusuran sementara dan berdasarkan tulisan yang dipublikasi itu Pos Kupang setahun lalu, tepatnya tanggal 3 Juli 2013 terkait acara HUT Ke-67 Bhayangkara di stadion. Ricky HP Sitohang, Senin (1/7/2013) malam. Dalam tulisan itu lanjut Paul, Pos Kupang dalam situs berita <i>online</i> -nya menulis khusus tentang profil Direktur Utama PT MMP, Ariyanisti

			Zulhanita PB, yang saat itu bersama orangtua dan dua temannya hadir sekaligus tampil bernyanyi pada acara itu.
22		Mabes Polri Ambil Alih Aduan Rudy Soik, (PK, Hal.1)	Setelah berpolemik dengan mempertahankan pendapat masing-masing, Brigpol Rudy Soik dan atasannya Direskrimsus Mochammad Slamet akhirnya di depan di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (27/8) dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa keputusan yang diambil Direskrimsus Polda NTT, Kombespol Mochammad Slamet untuk menghetikan proses penyelidikan atas 52 calon TKI ilegal adalah terlalu prematur. Bahkan Bareskrim Mabes Polri langsung memutuskan untuk melakukan asistensi dan akam mengambil alih proses terhadap kasus-kasus TKI di Polda NTT.
23	Minggu, 27 Agustus 2012	Kapolda: Rudy Diduga Sakit Hati (PK, hal.1 &7)	Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigadir Jendral Polisi (Brigjen Pol) I Ketut Untung Yoga Ana, menyayangkan langkah yang dilakukan Brigpol Rudy Soik, yang melaporkan komandanya ke Komnas HAM, Ombudsman dan Mabes Polri terkait penghentian penanganan Kasus 26 dari 52 orang calon tenaga kerja Indonesia Pada Januari 2014 lalu. Kepada wartawan di Jakarta, Senin, (25/8/2014), Untung Yoga mengatakan, Rudy seharusnya konsultasi terlebih dahulu dengan dirinya sebelum mengambil tindakan membawa dampak besar terhadap Rudy itu sendiri. "Ibaratnya (saya) sebagai bapaknya. Dia belum pernah menghadap saya tapi sudah kemana-mana. Kenapa dia begitu? Sampai orang luar harus bicara. Tapi ini saya hormai. Makanya saya tidak mau dia (Rudy) diperiksa tidak mau. Biar saja diselesaikan di internal," tandas Untung. Kapolda menduga bahwa pelaporan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mochammad Slamet, oleh anak buahnya, Brigpol Rudy Soik, kepada Komnas HAM lantaran sakit hati. Dugaan itu muncul setelah dia mengetahui bahwa Rudy telah dipindahkan ke Polres Timor Tengah Selatan (TTS).
24		Gelar Kasus di Mabes Polri (PK, hal.1 &7)	Gelar kasus itu untuk memberikan klarifikasi terkait laporan mantan anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTT, Brigpol Rudy Soik, kepada Komnas HAM dan Ombudsman RI. Diaktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda NTT, Kombespol Mochammad Slamet menyampaikan itu saat di

			konfirmasi Pos Kupang di Mapolda NTT, Selasa (26/8/2014). Ia menjelaskan gelar kasus yang di laporkan mantan anak buahnya itu dilaksanakan di badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Ditanya apa aja yang disampaikan dalam gelara kasus itu mantan Kapores Ngada itu mengatakan, gelar kasus di antaranya menjelaskan kronologi penyelidikan kasus 26 orang dari 52 Calon Tenaga Kerja Indonesesia (CTKI) yang diduga illegal karena tidak memiliki dokumen.
25		Kapolri Panggil Kapolda NTT (VN, hal.3)	Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Sutarman memanggil Kapolda NTT Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana bersama Perwira utama di Mapolda NTT Untuk Mengklarifikasi Persoalan penjualan manusia yang di ungkapkan salah satu mantan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT Brigpol Rudy Soik. “Klarifikasi itu akan di laksanakan Rabu, (27/8) hari ini di Mabes Polri dan harus dihadiri juga Brigpol Rudy Soik. Karena Brigpol Rudy Soik Sudah membeberkan sebagian kasus penjualan manusia yang juga melibatkan perwira utama di Mapolda NTT kepada berbagai institusi dan juga Mabes Polri” ungkap sumber VN, Selasa (26/8).
26		Ampera NTT Desak Polda NTT Transparan (VN, hal.3)	Aliansi Menolak Perdagangan Orang (AMPERA NTT) mendesaka Kepolisian Daerah (Polda) NTT supaya transparan dan jujur menangani masalah penjualan manusia NTT. Karena, persoalan penjualan manusia di NTT kuat dugaan menjadi salah satu ladang garapan oknum-oknum perwira polda untuk mengumpulkan pundi-pundi mereka. Penegasan itu tetuang dalam pernyataan sikap AMPERA yang diterima VN, Selasa (26/8) malam. AMPERA NTT terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil antara lain GMKI, PMKRI, LMND, GMNI, PIAR NTT, Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) BP GMIT, Perkumpulan Geng Motor IMUT, dan FAN NTT. Terkait di dalam AMPERA, Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan (J-RUK), CIS Timor, LBH APIK, IRGSC, KoAR, Bengkel APPeK, Forum Komunikasi Pemuda Kristen NTT, Perkumpulan PIKUL, Yayasan CEMARA, Forum Kebijakan NTT, Komunitas <i>Peace Maker</i> (Kompak), Rumah Perempuan, IKMAR NTT, DPD, KNPI NTT, dan DPD KNPI Kota Kupang.

27		Mabes Polri Panggil Direskrimsus Polda NTT (TE, hal.1)	Terkait aduan Brigpol Rudy Soik ke Komnas HAM dan Ombudsman, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kombespol Mochammad Slamet di panggil ke Mabes Polri untuk mengikuti gelar kasus di maksud. Slamet yang di konfirmasi wartawan, mengatakan penghentian penyidikan kasus itu dilakukan lantaran unsur pidana yang di tuduhkan dengan undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum terpenuhi. "Calon TKI masih proses Pra penempatan
28	26 agustus 2014	Polri Harus Lindungi Rudy Soik (PK, VN, hal.2)	Forum Pemuda NTT Pengerak Perdamaian dan Keadilan (Formadda NTT) menyatakan dukungan atas langkah berani anggota polisi Brigadir Rudy Soik, penyidik pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTT Kombes Pol. Mochammad Slamet ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (19/8) lalu, karena meng hentikan secara sepihak penyidikan kasus 26 calon TKI illegal asal NTT yang sedang ia tangani tanpa alasan yang jelas. "Kami akan mendukung dan akan berjuang bersama Brigadir Rudy Soik dalam mengerjakan kebenaran dan keadilan di jajaran Polda NTT," kata Ketua Umum Formadda NTT, Yohanes Kristo Tara, OFM, Senin (25/8) di Atambua. Pater Yohanes berharap agar institusi Polri memberikan Perlindungan hukum terhadap Brigadir Rudy yang berani membongkar kebobrokan dalam tubuh Polri sendiri
29		Rudy: Bila Perlu Jokowi Tahu (PK, hal. 1 & 7)	Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik mengaku baru kembali dari Jakarta mengadakan penghentian penyidikan kasus <i>human trafficking</i> di Polda NTT oleh atasannya kepada Komnas HAM dan Markas Besar (Mabes) Polri." Saya sudah mengadu ke Ombudsman, Komnas HAM, dan Komnas HAM sudah bersurat pada Kapolri. Saya baru tiba di Kupang, saya juga sudah melaporkan Dirskrimsus ke bagian Iwasda (Inspektur pegawai) Polda NTT bahwa perintah yang diberikan salah. Dan dia (Direskrimsus) melakukan pembiaran terhadap suatu peristiwa pidana," ujar Rudy melalui Ponselnya, Senin (25/8/2014) ia menjelaskan kasus dugaan <i>human trafficking</i> (penjualan manusia) yang di tangannya sudah memenuhi unsur pidana. Dan itu sudah melalui proses gelar

			perkara yang benar. Itu sudah di ketahui oleh Dirkrimsus bahwa perbuatan PT Malindo Mitra Perkasa (perusahaan pengerah jasa TKI) ini adalah perbuatan pidana. Kami sudah bertemu langsung dengan Dirkrimsus saat itu,” jelas Rudy. Namun jelas Rudy, setelah itu Dirkrimsus memberi perintah agar penyidikan kasus itu di hentikan dengan menyebut nama pejabat di Mabes Polri. Mereka mencantumkan nama, katanya ini milik Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum) Mabes Polri, saya sudah tanya Kapolda dan Wakapolda bilang tidak. Brigpol Rudy berulang kali mengatakan ia siap di pecat dari kesatuannya hanya karena menjalankan perintah undang-undang dan mengungkapkan kebenaran. Saya mau kasus ini harus jelas supaya tahu saya yang merekayasa atau Dirkrimsus yang merekayasa kasus ini. Supaya semua publik tahu, “Bilaperlu presiden terpilih Jokowi juga tahu,” tegasnya.
30		Polda NTT Klarifikasi, (PK, hal.1)	Polda NTT siap memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM dan Ombudsman terkait laporan Brigpol Rudy Soik. Klarifikasi itu di sampaikan manakala Komnas HAM dan Ombudsman datang Ke Polda NTT. Demikian Kapolda NTT, Brigjen Polisi I Ketut Untung Yoga Ana melalui Kabid Humas Polda NTT, AKBP Okto Riwu, Senin (25/8/2014) siang.
31		Tak Penuhi Unsur Pidana (PK, hal.1)	Penghentian kasus dugaan <i>human trafficking</i> (perdagangan manusia) 26 orang dari 52 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diduga ilegal yang di tamping PT. Malindo Mitra Perkasa Karena unsur yang dituduhkan dengan undang- undang No: 39/2009 tentang Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri tidak terpenuhi. Sedangkan 52 calon TKI itu masih proses pra-penempatan atau belum ditempatkan di luar negeri. Demikian penjelasan Direktur Reserse Khusus Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mochammad Slamet, di Polda NTT, Senin (25/8/2014). Ia dikonfirmasi terkait laporan mantan anggotanya Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik Kepada, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Berapa pekan lalu.
32		Ampera Tak Biarkan Rudy Sendirian (TE, hal. 1)	Aliansi Melawan Perdagangan Orang (Ampera) NTT tidak akan membiarkan Brigpol Rudy Soik yang melaporkan atasannya terkait dugaan kasus perdagangan manusia, berjalan sendirian. Bahkan Lembaga Bantuan Hukum

			(LBH) Jakarta siap membantu Rudy
33		Komnas HAM: Jangan Pecat Rudy Soik (TE, hal. 1 & 7)	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) rupanya tidak main-main dalam mendukung Brigpol Rudy Soik. “Propam Mabes Polri sudah saya minta bahwa maksud baik Rudy Soik itu sebagai bagian dari pembenahan intitusi polisi. Yang jelas, Rudy Soik itu membongkar jaringan <i>trafficking</i> di NTT,” tandas Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigay kepada Timor Ekspres (Fajar Media Center) di Jakarta, Senin (25/8).
34		Rudy Soik dan Pemberantasan Mafia TKI (TE, Tajuk Rencana, hal.4)	Langkah berani Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik, salah satu penyidik di jajaran Polda NTT patut mendapat apresiasi. Disebut langkah berani, karena yang dilakukan Rudy adalah mengadukan dua atasannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kontras dan Ombudsman RI Terkait dengan ketidakberesan, Ketidaktransparan, dan dugaan penyimpangan kasus-kasus TKI di NTT, dan kasus lainnya yang terkesan (diduga) didiamkan aparat kepolisian, misalnya kasus kematian janggal Paulus Usnat di tahanan Polsek Nunpene-TTU serta kematian Obaja Nakmofa.
35	Senin, 25 Agustus 2014	Rudy Soik Terancam Dipecat (TE, hal.1)	Akibat tidak menjalankan tugas tanpa alasan yang jelas atau disersi, Brigpol Rudy Soik, anggota pada Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT, terancam diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) alias dipecat. Kabid Humas Polda NTT, AKBP Okto Riwu yang di konfirmasi, Minggu (24/8), mengatakan Rudy telah sebulan lebih tidak bekerja sebulan lebih tanpa surat pemberitahuan. Dan kasus disersi ini telah di tangani penyidik pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).
36		Tiga Pejabat Polda Dimutasi (TE, hal. 1 & 7)	Semoga ini tidak berkaitan dengan kicauan salah satu penyidik Polda NTT, Brigpol Rudy Soik yang mengadukan atasannya kesejumlah lembaga negara beberapa hari lalu. Betapa tidak Markas Besar (Mabes) Polri baru saja melakukan rotasi terhadap parapati atau pamennya, baik di daerah dan juga di Mabes Polri. Dan tiga pejabat dilingkup Polda NTT yakni Dirpolair Dirlantas dan Dirresnarkoba juga ikut di ganti. Rotasi ini sesuai data yang diperoleh Timor Ekspres (Fajar Media Center) berdasarkan telegram promosi dan mutasi tugas

			<p>baru yang ditandatangani Wakapolri Komjenpol Badrodin Haiti atas nama Kapolri tertanggal 22 Agustus 2014. Dalam bocoran rotasi itu Dirpolair Polda NTT, Kombespol Purwoko Yudianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolair Bali. Kedua Dirlantas Polda NTT Kombespol Teguh Dwi Warsono diangkat dalam jabatan baru sebagai Karosarpras Polda Maluku, Ketiga Dirresnarkoba Polda NTT, Kombes Pol Samudi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit Ditipidkor Bareskrim Polri.</p>
37		<p>Siapapun Akan Saya Lawan (PK, hal.5)</p>	<p>Sebagai putra asli NTT Brigadir Polisi Rudy Soik sangat prihatin ketika anak-anak NTT dipekerjakan tanpa melalui prosedur yang benar. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada calon TKI tersebut, apalagi ketika komunikasi dengan kerabat TKI itu sulit di lakukan. "saya putra NTT yang menjadi aparaturnya akan melawan siapapun yang menjual anak NTT dan sampai kapanpun akan tetap saya lawan," kata Rudy Minggu (24/8/2014). Seperti yang diberitakan Pos Kupang, Minggu (24/08), Rudy telah melapor komandannya, Direktur Kriminal Khusus Polda NTT Komisaris Besar Polisi MS, melindungi PT Malindo Mitra Perkasa (PT MMT). Perusahaan tersebut merupakan penyedia jasa tenaga kerja ilegal asal Indonesia di Kota Kupang, selain tidak memiliki izin usaha, PT MMP juga kerap dilaporkan ke Polda NTT. Namun Kasusnya mengedap begitu saja.</p>
38	<p>Sabtu, 23 Agustus 2014</p>	<p>Dukungan Rudy Soik Meluas (TE, hal. 1 & 7)</p>	<p>Ternyata, tak hanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman RI yang mendukung langkah Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik membongkar kejanggalan pengungkapan kasus-kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau kasus lainnya di tubuh Polda NTT. Dukungan untuk salah satu penyidik pembantu di Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda NTT ini mulai meluas. Beberapa lembaga, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, DPRD NTT, Pojka MPM dan PIAR NTT juga mendukung langkah polisi pemberani ini. Anggota Komisi III DPD RI (membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan), Abraham Paul Liyanto, Kamis (21/8) menyatakan mendukung dan siap memberi perlindungan secara lembaga ke Brigpol Rudy untuk berani membongkar jaringan mafia TKI di NTT. "Langkah Brigpol Rudy Soik sangat kami apresiasi. Jadi tidak hanya LPSK saja</p>

			yang akan melindungi. Kami DPD RI juga akan melindungi Rudy biar masalah penanganan kasus-kasus TKI di NTT ini bisa terungkap. Kami berharap Rudy Soik juga memberi data ke kami di DPD RI, dan kami akan berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Kemenakertrans RI agar persoalan ini bisa tuntas," kata sosok yang akrab disapa Paul Liyanto ini.
39		Pemkot Sosialisasi UU <i>Trafficking</i> (TE, hal.11)	Kota Kupang dikenal sebagai Kota transit tenaga kerja, baik perempuan maupun anak yang direkrut oleh para perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Karena sebagai kota transit, maka perlu melakukan pengawasan yang ketat, karena takutnya ada orang direkrut untuk bekerja diluar negeri, tidak sesuai prosedur. Selain itu, saat operasi banyak TKI memiliki dokumen kependudukan Kota Kupang, tapi sebenarnya bukan warga Kota Kupang. Melihat kondisi ini, maka pengawasan perlu dilakukan dari semua pihak. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, drg. Francisca Johana, kepada wartawan di Kantor Walikota Kupang, Kamis (21/8) menuturkan, kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang <i>Trafficking</i> , yang akan dilakukan di enam kecamatan tersebut, dilaksanakan selama lima hari. "Kegiatan sosialisasi yang dilakukan selain meningkatkan sistem pengawasan dan juga merupakan tugas dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, untuk meminimalisir <i>trafficking</i> perempuan dan anak," akunya. Sosialisasi UU tersebut kata dia, pihaknya akan menggandeng Lembaga Rumah Perempuan Kupang, yang merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang bergerak dibidang <i>Trafficking</i> . "Sosialisasi UU <i>Trafficking</i> , melibatkan masyarakat Kecamatan Kelapa Lima, Oebobo, Alak, Kota Raja, Kota Lama dan Kecamatan Maulafa. Disamping itu, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ,dan RT/RW serta gugus tugas ditingkat kecamatan, yang selama ini sudah terbentuk di enam kecamatan tersebut," katanya.
40	Kamis 21	LPSK Lindungi Brigpol Rudy Soik (TE, hal 1 & 7)	Tindakan Brigpol Rudy Soik yang mengadukan atasannya di Polda NTT rupaya tidak hanya didukung Komnas HAM dan sejumlah LSM di Jakarta. Bahkan

	<p>Agustus 2014</p>	<p>Ombudsman Republik Indonesia serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) langsung memberikan respon positif atas pengaduan Brigpol Rudy yang juga penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT itu. Setelah mengadu ke Komnas HAM, Brigpol Rudy kembali mengadukan atasannya ke Ombudsman RI, Rabu (20/8). Rudy yang didampingi Ketua Pokja MPM, Gabriel Sola itu diterima langsung Anggota Ombudsman RI, Pranowo Dahlan. Dan, Pranowo pun langsung menyatakan segera meminta klarifikasi dari Mabes Polri dan Polda NTT. Bahkan mantan petinggi di tubuh Polri itu mempertanyakan adanya intervensi dari atasan terhadap penyidik yang tidak dibolehkan dalam aturan. "Kalaupun tidak ada perintah, sebagai penyidik kan punya tugas untuk ambil tindakan ketika ada masalah. Lalu kan seharusnya penyidik tidak boleh diintervensi. Tidak hanya oleh Komandan, Kapolda pun tidak boleh intervensi karena itu tanggungjawab seorang penyidik. Karena untuk memutuskan kasus itu dihentikan atau dilanjutkan, ada prosedurnya," tandas Pranowo. Sebagai tindaklanjut, kata Pranowo, Ombudsman RI akan meminta klarifikasi Kapolda NTT, Bareskrim Polri serta Propam untuk mengetahui sejauhmana penanganan kasus tersebut. Bahkan dia akan mempertanyakan sejumlah kasus yang diduga dipetisikan Polda NTT. Misalnya kematian tahanan Polsek Nunpene, Kabupaten TTU, Paulus Usnaat dan proses pelelangan barang bukti yang tidak prosedural di tubuh Polda NTT serta beberapa kasus lainnya. Sementara Brigpol Rudy dalam laporannya menjelaskan, dirinya tidak berniat menyerang institusi Polri. Namun dia ingin mengatakan yang sebenarnya yang terjadi atas penanganan kasus-kasus perdagangan manusia di NTT yang selama ini tidak pernah tuntas. Bahkan sebagai penyidik, dirinya mengetahui persis. "Apa yang dilakukan Dirkrimsus Polda NTT, Kombes Pol Mochammad Slamet adalah perbuatan yang salah. Dia membiarkan anak-anak NTT di perdagangkan. Saya bicara karena saya pelaku langsung yang turun TKP dan pemeriksanya saat itu saya orang yang datang langsung ke PT. MMP," papar Rudy kepada Pranowo. Dijelaskan Rudy, dirinya melihat langsung 52 TKW yang ditampung di tiga ruangan dan salah satu</p>
--	--------------------------------	--

			<p>ruanganya garasi mobil. Dan, 26 diantaranya tidak memiliki dokumen sama sekali. Demikian pula ketika atasannya meminta penghentian proses dan dititipkan di Disnakertrans Provinsi NTT.</p> <p>Menurut dia, hanya selang waktu sekira satu jam, atasannya tersebut membuat surat permohonan kepada Disnakertrans untuk diambil kembali para TKW dengan alasan melanjutkan proses penyidikan. "Kenyataannya, kami diperintahkan untuk bawa TKI itu kembali perusahaan yang sudah jelas-jelas tidak ada izin dan tidak ada dokumen untuk selanjutnya dikirim secara ilegal," bebernya. Terkait keterangan Kabid Humas Polda NTT, Okto Riwu, menurut Rudy, dirinya yang tahu persis kejadian itu. "Kalau bapak (Okto Riwu) ingin tahu materil pidananya nanti saya ingin gelar di depan bapak Kapolda maupun di depan para pejabat Polda. Kalau dikatakan bukan kasus pidana, saya sudah gelar di Mabes Polri, di depan Kombespol Agung dan Ibu Lily (Wakil Ketua LPSK). Saat itu dari mabes katakan bahwa kasus itu memenuhi unsur pidana," tantang Rudy.</p>
41		<p>Dipilih Dipukul Ketimbang Siksaan Makanan Sedikit (TE, hal.12)</p>	<p>Saat Ketua Majelis Hakim, Parlas Nababan menanyakan hukuman yang diberikan, jika melakukan kesalahan, Atrisma mengatakan, dia dan rekan-rekannya akan ditonjok menggunakan bola besi di dahi. Tak hanya itu, gadis yang saat direkrut bekerja masih berumur 13 tahun itu mengaku, setiap orang yang berbuat kesalahan, porsi makannya akan dikurangi. Selama seminggu mereka hanya diberi makan empat sendok nasi dan satu gelas air. "Lebih baik dipukul daripada dikurangi porsi makannya. Soalnya kita makan tidak kenyang, apalagi kerjanya banyak," katanya. Soal kronologis sehingga dirinya sampai bekerja di Medan, di hadapan Majelis Hakim, Parlas Nababan dan dua hakim anggota, Jamsir Simanjuntak dan Ida Ayu, juga Jaksa Penuntut Umum (JPU), Lasmaria F. Siregar serta Ester selaku pengacara terdakwa dan terdakwa Rebecca Ledoh, Atrisma menerangkan, kejadian itu bermula ketika dia bertemu dengan John Anin (perekrut lapangan) saat bermain di rumah pamannya. John berhasil membujuk korban sehingga korban mau diberangkatkan ke Oesao, tanpa memberitahu ke orangtuanya. Selanjutnya, korban diantar ke</p>

			<p>perusahaan TKW milik Andy Killa. John kemudian mendapat bayaran sebesar Rp 1.300.000. Korban kemudian diiming-iming bekerja di Jakarta dan Malaysia. Selama seminggu, korban berada di rumah Andy Killa, sembari menunggu pengurusan paspor. Sayangnya, korban tidak diberangkatkan karena umurnya masih 13 tahun. Korban kemudian diantar ke rumah Rebecca. Sekali lagi korban diiming-iming dengan gaji Rp 750.000 per bulan, jika mau bekerja di perusahaan sarang burung walet milik Mohar di Medan. Sebelum diberangkatkan, Irwan anak Rebecca mengurus KTP korban yang mana umur korban dinaikan menjadi 22 tahun. Berbekal KTP palsu inilah, korban akhirnya diberangkatkan dengan mulus, menuju Medan bersama Novi korban lainnya. Ironisnya, terdakwa Rebecca Ledoh masih tetap menyangkal, kalau dirinya tidak mengenal korban sama sekali. Jawabannya itu akhirnya mendapat respon dari pengunjung sidang. Pihak-pihak yang selama ini mendampingi korban, terlihat sangat emosional.</p>
42	19 Agustus 2014	Gereja Berperan Hentikan <i>Trafficking</i> (PK, hal.14)	<p>Kasus <i>human trafficking</i> (perdagangan orang) semakin marak terjadi di Provinsi NTT. Kondisi ini menjadi tantangan untuk diatasi bersama, termasuk peran gereja untuk menghentikannya, selain para tokoh masyarakat."Gereja berperan sangat penting dalam menangani kasus <i>trafficking</i>. Berdasarkan data yang diperoleh mahasiswa UKAW Jurusan Teologi, saat ini terdapat 200 orang TKI yang sedang bekerja di luar daerah. Data ini kami peroleh dari 9 jemaat yang ada di Belu dan TTU," ujar Pdt. Meri Kolimon S.Th, Koordinator Jaringan Perempuan Indonesia Timur (J-PIT) saat tampil dalam seminar di Aula GMIT Imanuel Kefamenanu, Jumat (15/8/2014) siang. Disaksikan Pos Kupang, seminar yang dimulai sekitar pukul 10.00 wita ini, dihadiri mahasiswa/mahasiswi praktek Teologi Universitas Kristen Arta Wacana (UKAW) Kupang, para pendeta Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) TTU, Ketua Sinode TTU, Pdt. Paulus Y Nubatonis, S.Th, serta para jemaat setempat.</p>
43	Sabtu, 16 Agustus	Kemerdekaan Itu Bukan Milik Kaum Miskin(VN, hal.3)	<p>Merdeka dari bangsa penjajah merupakan titipan para pendiri bangsa Indonesia 69 tahun lalu. Niat itu terlaksana dengan dikumandangkannya proklamasi Kemerdekaan yang di peringati setiap tanggal 17 Agustus. Tetapi</p>

	2014		apakah kemerdekaan itu sudah menjadi milik segeanap bangsa Indonesia? Ataukah kemerdekaan itu hanyalah milik kaum berpunya. Gedung pengadilan Negeri Kupang, Rabu (13/18) menjadi contoh sisi lain kemerdekaan Bangsa Indonesia. Empat orang anak negeri yakni Erni Anin , Elisabet Funan, Yanuaria Abuk dan Yesinta Tefa merupakan saksi hidup di cabutnya kemerdekaan dan atas nama kemiskinan. Anak perempuan yang baru beranjak dewasa itu harus menjalani persidangan terkait penjualan manusia dengan terdakwa Rebecca Ledoh–Oematan, mereka di jual untuk dipekerjakan ditempat usaha sarang burung wallet milik pengusaha di Medan, Sumatra Utara.
44	Rabu, 13 Agustus 2014	Pemprov Tak Bertaring Tutup PJTKI Nakal (VN, hal.9)	Pemerintah Provinsi NTT dinilai tidak bertaring untuk menutup Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) nakal yang beroperasi di NTT. Padahal Pemprov berperan penting untuk mengeluarkan izin maupun menutup PJTKI yang menyalahi prosedur dan perizinannya. Anggota DPD RI Sarah Lery Mboeik yang dihubungi VN, Selasa (12/8), mengatakan keseriusan pemerintah menangani kasus TKI di NTT harus dipertaruhkan, jika NTT bebas dari masalah <i>trafficking</i> . Dia menilai sejauh ini pemerintah tidak memiliki taring dalam menyelesaikan setiap kasus TKI ilegal. Hal ini terbukti dengan selalu ada pengamanan TKI ilegal secara terus menerus yang terahir PT Surya Jaya Utama Abadi yang mengirim tujuh TKW ilegal tetapi tidak ada tindakan dari Pemerintah. Bahkan menurutnya korban sudah beberapa kali di tangkap dalam setiap tindakan pengamanan. “Pemerintah harus segera melakukan moratorium untuk membatasi pengiriman tenaga kerja keluar negeri, serta membenahi sistem pelayanan jasa tenaga kerja di dalam negeri,” pintanya.
45	Sabtu, 9 Agustus 2014	Tindak Tegas Oknum Penyalur TKW Ilegal (VN, hal.9)	Kasus pengiriman TKW ilegal oleh PT Surya Jaya Utama Abadi, Kamis (7/8) menarik perhatian bergai pihak. Para pelaku pengiriman bersama perusahaannya harus ditindak tegas oleh aparat pengamanan walaupun tidak dilaporkan oleh Badan Pelayanan Perlindungan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) NTT. Anggota DPD RI Sarah Lery Mboeik kepada VN, Jumat (8/8) menyatakan sungguh di sayangkan jika para pelakunya tidak diadili sesuai aturan hukum. “Seharusnya aparat keaman proaktif untuk

			memproses hukum Kasus penangkapan tujuh TKW ilegal tersebut. Bila perlu tutup kantor cabang di NTT,” tandasnya. Dia mengatakan para pengambil kebijakan harus berani mengambil tindakan tegas bagi para pelakunya, sehingga ada efek jera bagi para pelaku yang akan mengulangi hal yang sama. “Selama ini semua pihak telah bekerja keras dalam menggagalkan TKI ilegal yang hendak di berangkatkan keluar NTT, namun semuanya telah ter-skenario sehingga para korbanpun akan ditangkap kembali dengan perusahaan yang berbeda menjadi fasilitatornya,” jelasnya.
46	Jumat, 8 Agustus 2014	BP3TKI Bosan Lapor Kasus TKI ke Polisi (PK, hal.8)	Kepala Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT Tito Tiran mengatakan pihaknya sudah bosan menyerahkan kasus TKI kepada Polisi di NTT. Karena itu perusahaan jasa resmi sengaja mengirim TKI ilegal akan dibina dan dilengkapi berkas ketenagakerjaannya Kemudian di kirim ke tempat tujuan kerja mereka. Hal ini di ungkapka Tito Tiran ketika menjemput langsung ketujuh TKW ilegal yang diamankan aparat TNI Angkatan Udara (AU) di Bandara El Tari Kupang, Kamis (7/8). Dia mengaku pihaknya sudah gerah menyerahkan kasus-kasus TKI ilegal kepada Polisi di NTT karena Kasus-kasus yang dilaporkan tidak pernah tuntas penyelesaiannya. “Kami sudah bosan menyerahkan kasus-kasus TKI ilegal kepada Polisi karena kasus-kasus TKI hingga saat ini tidak pernah tuntas. Jadi kami akan bina Perusahaan resmi dan TKI ilegal yang di amankan oleh aparat TNI AU ataupun instansi lainnya untuk dilengkapi berkas para TKW sebelum diberangkatkan,” tandasnya.
47		TNI AU Amankan Tujuh TKW Ilegal (PK, hal.9)	Aparat TNI Angkatan Udara (AU) yang bertugas di Bandara El Tari Kupang mengamankan tujuh Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia via Palembang Sumatra Selatan , Kamis (7/8) pagi. Para TKW yang di berangkatkan PT Surya Jaya Utama Abadi dengan pesawat Lion Air Pukul 11.00 Wita ini hanya memiliki KTP yang diduga dipalsukan oleh PT yang beralamat di Jalan Bajawa, RT 04/RW 11, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang itu. Komandan Lanud El Tari Kupang, Kolonel Penerbangan Andi Wijaya, yang di ditemui di ruang kerjanya, kemarin Sore, mengaku para TKW ini di amankan lantaran tidak memliki berkas ketenagakerjaan. Setelah

			diinterogasi, para TKW hanya memiliki KTP karena itu diamankan oleh Anggota TNI AU," tandas Andi.
48		Disuruh Minum Ramuan Agar Tidak Haid (PK, hal.3)	"Selama 11 bulan saya dan teman-teman bekerja industri sarang burung walet milk Pak Mohar di Medan Sumatra Utara. Rambut kami di cukur botak kami di suruh minum ramuan obat sehingga tidak dapat haid atau datang bulan." Ini merupakan kesaksian salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal daerah NTT yang bekerja di Medan, Sumatra Utara (Sumut), Herdiana Ndun (33) saat di periksa di Pengadilan Kelas 1 A Kupang, Rabu (6/8/2014). Sidang ini dipimpin Majelis Hakim Ketua Parlas Nababan, SH, MH didampingi Ida, SH, MH dan Jamsir Simanjuntak, SH dan panitera pengganti, Melki Borel, SH, Jaksa Penuntut Umum Lala Siregar, SH dan Eirene Oranay, SH. Sementara Rebecca sebagai terdakwa didampingi penasehat hukum, Ester Day, SH dan rekan. Herdiana mengaku, sebelum berangkat ke Medan, Rebecca membuat kartu tanda penduduk (KTP) dengan menggantikan namanya menjadi Eri Ndun dan menurunkan usianya. Di Medan dirinya bersama 25 TKW lain, bekerja setiap hari membersihkan sarang walet mulai pukul 07.00-20.00 waktu setempat. Setelah membersihkan sarang walet, mereka juga harus mengepel dan menyapu. "Selama 11 bulan saya di tempat bekerja itu, tidak terima gaji. Dan kami semua dicukur rambut, kemudian diberi minum ramuan yang katanya untuk tambah darah, tapi ternyata kami tidak datang bulan semua atau tidak haid," kata Herdiana. Dia menjelaskan, selama di tempat kerja juga, mereka hanya diberi makan seadanya, bahkan setiap hari harus mendapat caci- maki seperti monyet, anjing, babi serta lonte. "Saya sebenarnya dikontrak tiga tahun kerja, tapi saya tidak tahan siksaan makanya saya keluar," katanya.
49		Kami Diminta Telanjang (PK, hal.3)	"Jika kami melawan tidak minum ramuan itu, maka tidak diberi makan malam. Bahkan, kalau kami mau ke kamar mandi untuk buang air, harus berteriak nama Pak Mohar beberapa kali dan memberitahukan bahwa kami mau ke kamar mandi. Saat berteriak Pak Mohar itu datang dan minta supaya kami telanjang bulat (tanggalkan pakaian, Red) baru masuk ke kamar mandi," tuturnya. "Saat kamu telanjang apakah Mohar majikan kamu itu melihat kamu,"

			<p>tanya majelis hakim."Selama kami di tempat kerja kami tetap di lantai tiga dan siapa saja diantara kami yang hendak ke kamar mandi harus berteriak nama Pak Mohar beberapa kali. Pasti Pak Mohar ada didepan kamar mandi. Kami diminta telanjang dan Pak Mohar lihat kami dan angguk-angguk. Saat itu juga istri Pak Mohar, Haryati turut melihat kami. Begitu lagi kamar mandi kami pintunya tidak ada kunci," ujar Herdiana polos. Dia mengakui, setelah kasus itu terkuak ketika dirinya hendak meloncat, kemudian ia dipulangkan ke Kupang pada bulan Januari 2014." Dan ketika saya tiba di Kupang, teman saya bernama Marni Baun dan Riska Bota meninggal dunia akibat perlakuan tidak manusia di Medan," ujarnya. Parlas Nababan mengatakan, apa yang dialami saksi korban itu lebih sadis daripada di neraka. "Pelaku itu lebih bejat dari singa dan harimau. Anjing yang kita pelihara saja pasti kita beri tulang tapi ini tidak, malah disiksa," kata Nababan. Saksi lain, Yanti, diminta ke Medan oleh terdakwa dengan iming-iming mendapat gaji Rp 750.000 per bulan, namun kenyataan tidak diberi gaji.</p>
--	--	--	--